



BPKAD

BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 188.45/556/20.01.03/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGUNA ANGGARAN,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENERIMAAN  
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2023, maka perlu menunjuk dan mengangkat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 110 Tahun 2022;

11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Dan Mengangkat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disamping tugas pokoknya mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang dipimpinnya meliputi :
    - a. menyusun RKA-SKPD;
    - b. menyusun DPA-SKPD;
    - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    - d. melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
    - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    - h. menandatangani SPM;
    - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
    - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
    - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
    - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - m. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
    - n. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi SKPD meliputi:
    - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
    - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
  - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kuasa Pengguna Anggaran di RSUD Dr. Iskak dan RSUD Campurdarat Tulungagung mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - d. melaksanakan anggaran Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - g. menandatangani SPM;
  - h. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - j. mengawasi pelaksanaan anggaran Unit Organisasi Bersifat Khusus yang dipimpinnya;
  - k. menetapkan PPTK dan PPK-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - l. menetapkan pejabat lainnya dalam Unit Organisasi Bersifat Khusus dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
  - m. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
  - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
6. Bendaharara Pengeluaran Pembantu di RSUD Dr. Iskak dan RSUD Campurdarat Tulungagung mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  - menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  - melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  - menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  - memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas, dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening Kas Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterima.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 08 Nopember 2022

